

# RENCANA STRATEGIS

## PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

# 2015 - 2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
NONFORMAL DAN INFORMAL  
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang.....	
B. Landasan Filosofis .....	
C. Landasan Hukum .....	
D. Landasan Historis .....	
BAB II. VISI, MISI DAN TATA NILAI	
BAB III. ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL .....	
A. Kondisi Internal .....	
B. Kondisi Eksternal.....	
C. Tantangan dan Permasalahan .....	
BAB IV. ARAH DAN STRATEGI PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2015-2019 .....	
A. Nawacita Presiden Republik Indonesia.....	
B. Tujuan Strategis Pembinaan Kursus dan Pelatihan .....	
C. Sasaran Strategis .....	
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	
BAB V. PROGRAM PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2015-2019 .....	
A. Program dan Kegiatan .....	
B. Sasaran Program .....	
C. Indikator Keberhasilan.....	
BAB VI. KERANGKA IMPLEMENTASI .....	
A. Strategi Pendanaan .....	
B. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal .....	
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi .....	
BAB VII. PENUTUP.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai Landasan Normatif berdasar konstitusi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kursus, sebagai bagian integral dari Pendidikan Nasional. Ada 5 (lima) pokok pikiran normative-implimentatif yang melandasi tugas Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan. Kelima pokok pemikiran tersebut adalah:

1. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal. Pasal 26 Ayat (4), sebagai satuan pendidikan nonformal, lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kemampuan ekstra prima untuk melayani warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Pasal 26 ayat 1);
2. Sebagai satuan pendidikan nonformal, lembaga kursus dan pelatihan harus dibina dan dikembangkan agar dapat melaksanakan fungsinya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan *pengetahuan* dan *keterampilan fungsional* serta pengembangan *sikap kepribadian profesional* (pasal 26 ayat 2). Ketentuan undang-undang ini menjadi landasan bahwa *goal setting* dari pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan harus menghasilkan lulusan yang pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional. Hal ini menjadi tuntutan dunia kerja dan dunia usaha pada era MEA dan APEC yang segera kita berada di dalamnya;
3. Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan harus menuju pada meningkatnya kemampuan lembaga kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal *pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan*

*profesi, bekerja, usah mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Pasal 26 Ayat 5);*

4. Hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal, dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (Pasal 26 Ayat 6). Dengan ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Perpres no 8 tahun 2012, dan ketentuan lain yang mengatur tentang Standar Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikasi Kompetensi, hal tersebut merupakan pintu masuk sekaligus sebagai sasaran kualitatif dari pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan. Hal ini pula yang menjadi tugas Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Dit. Binsuslat) dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan.
5. Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan dilaksanakan searah dan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pembangunan nasional dengan memperhatikan kaidah; (1) percepatan dan perluasan pelayanan bagi warga masyarakat; (2) peningkatankualitas yang meliputi Kualitas Input yang terdiri dari Raw Input, Instrumental Input, Ecological Input; Process (Proses Pendidikan sesuai dengan standar kompetensi, standar pelaksanaan kegiatan belajar); Output atau lulusan pendidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan standar kompetensi nasional dan bahkan internasional; dan Outcome yang ukurannya lulusan kursus dan pelatihan dapat diterima oleh dunia kerja/dunia usaha, mampu menjadi pekerja mandiri, mampu menjadi wirausaha kreatif.

Dalam menghadapi pasar bebas, pemerintah perlu mempersiapkan dengan baik dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti para pelaku bisnis, praktisi dan akademisi. Terutama dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa/negara maju. SDM yang berkompeten dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan keluaran/produk yang mampu

bersaing di tingkat dunia pada era-perdagangan bebas yang terbatas di lingkungan ASEAN, tetapi juga antar negara-negara di dunia.

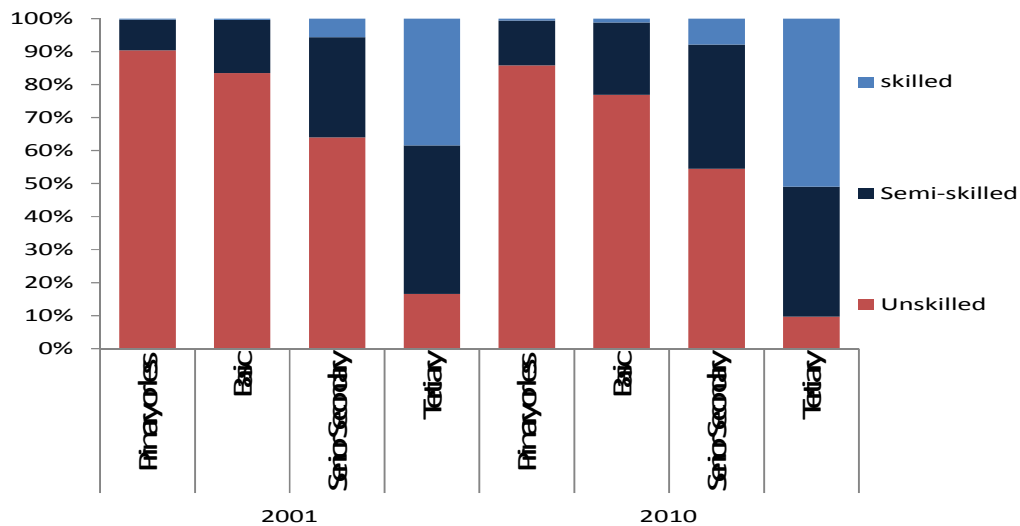
Dalam menghadapi persaingan bebas, pemerintah melaksanakan beberapa program dan metode pendidikan yang mengedepankan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*) sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat serta berbasis pada teknologi dan informasi (*Information and Communication Technology*). Pemerintah terus berbenah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi liberalisasi dan globalisasi. Salah satu usaha meningkatkan kompetensi SDM dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan yang terstandar, sehingga dapat mengantarkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan berdaya saing, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional serta dan mempengaruhi kekuatan ekonomi sebuah negara.

Di sisi lain berbagai kesepakatan kerjasama ekonomi, memastikan perlunya penyiapan dan kesiapan SDM sebagai penggerak ekonomi tersebut. Pembentukan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) atau pada tahun 1989 bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Secara regional, di kawasan ASEAN telah dibentuk ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Hal yang paling mendesak yang perlu diantisipasi misalnya program "Blue print" ASEAN *Economic Community* (AEC) yang berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

- a. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
- c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
- d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

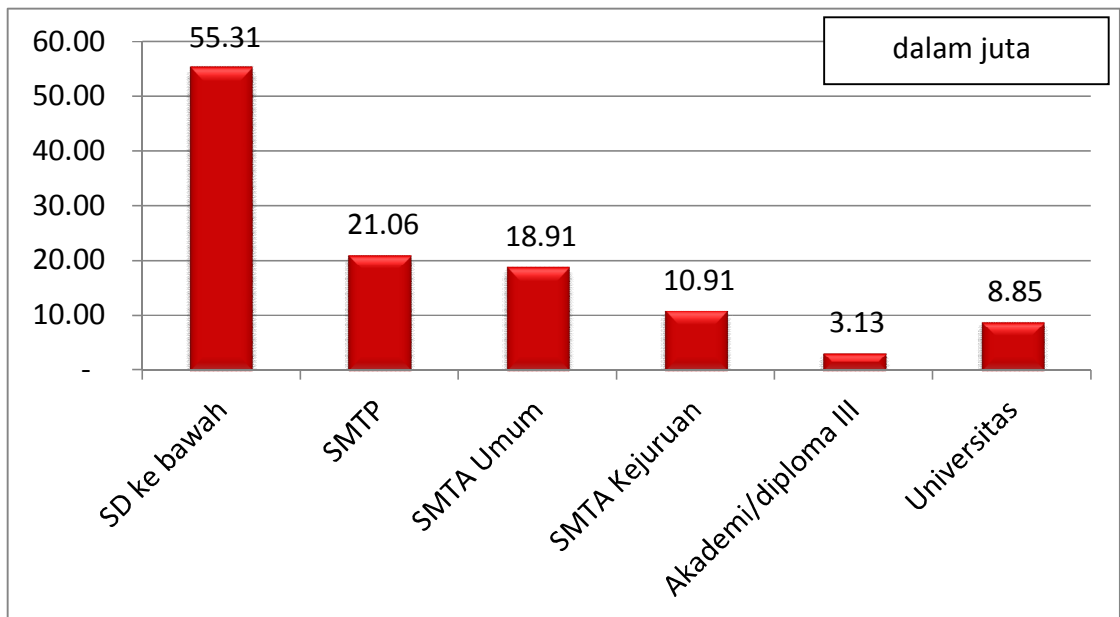
Dalam konteks pembangunan nasional, telah dirumuskan pengembangan ekonomi kawasan dalam bentuk Master-plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memiliki delapan proyek unggulan di 6 koridor yang perlu didukung oleh SDM yang terampil. Hal ini kemudian dipertegas dalam RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mendukung kerjasama ekonomi dan pengembangan potensi di sejumlah daerah, maka perlu dilakukan identifikasi kompetensi yang diperlukan, kemudian disusun secara cepat dan akurat bentuk program kursus dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kerjasama ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Upaya percepatan penyiapan tersebut dapat dengan cepat diantisipasi dan disiapkan oleh kegiatan kursus dan pelatihan yang memang ditujukan untuk pengembangan ekonomi. Pada banyak kondisi, terdapat gap antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga lulusan pendidikan formal perlu mengikuti kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerjasama dan pengembangan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, peran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sangat penting dan strategis dalam rangka percepatan penyiapan SDM yang kompeten, handal, dan profesional.

Kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang harus dijawab sebagai tantangan masa depan bangsa Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, Februari 2014), keadaan angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 menunjukkan adanya peningkatan mencapai 125,3 juta orang dan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta orang. Jumlah penganggur terbuka mencapai 7,15 juta orang atau 5,7% dari jumlah angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tersebut terdapat sejumlah tenaga kerja yang belum memiliki keahlian dan atau ketrampilan yang memadai seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kualitas lulusan menurut pemberi kerja**  
**Sumber : World Bank, .....**

Penduduk yang bekerja pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ke bawah masih mendominasi yaitu 55,3 juta orang (46,80%), sedangkan penduduk bekerja pada pendidikan Diploma ke atas hanya 11,9 juta orang (10,11%). Berdasarkan lapangan kerja utama, penduduk yang bekerja secara berturut-turut pertanian sebesar 40,83%, sektor perdagangan sebesar 25,81%, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 18,48%, sektor industri 15,39%, dan sisanya di sektor konstruksi, transportasi, dan keuangan. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2. Penduduk yang bekerja ini sebesar 40,19% bekerja di sektor formal dan 59,81% bekerja pada sektor informal. Dengan demikian, peran pendidikan non formal semakin diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

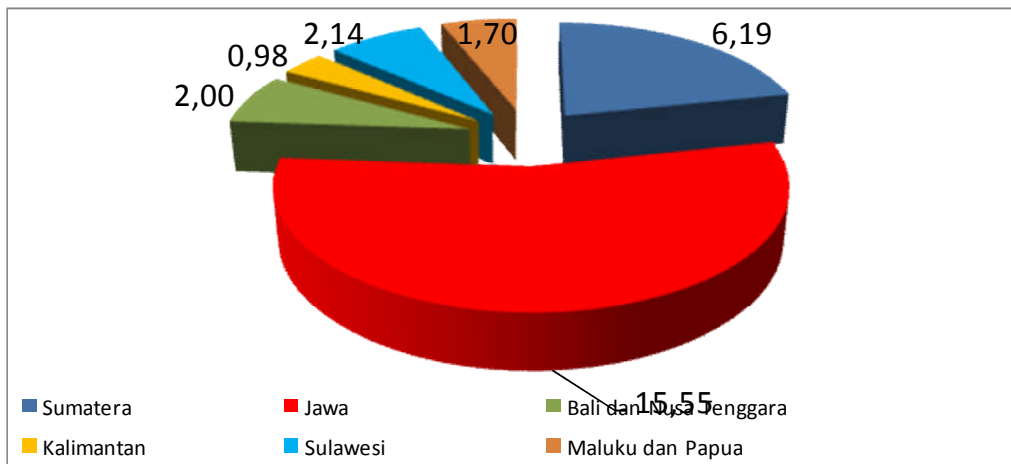


Gambar 2. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Latar Belakang Pendidikan  
 Sumber : Biro Pusat Statistik, 2012

Isu lain yang juga memerlukan perhatian adalah keberlanjutan belajar dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Anak dari keluarga miskin cenderung untuk tidak melanjutkan sekolah, sementara itu dari keluarga kaya juga dijumpai masih banyak yang tidak melanjutkan sekolah dengan titik henti yang berbeda jenjang. Kondisi ini diharapkan akan membaik setelah adanya banyak program beasiswa dari pemerintah (bidik misi, pemerintah daerah, dll) maupun kepedulian beberapa perusahaan dalam mengalokasikan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) nya untuk beasiswa. Namun demikian, karena kondisi ekonomi bukan satu-satunya alasan anak tidak melanjutkan sekolah maka tetap perlu untuk dikembangkan alternatif pendidikan yang relatif lebih mudah dan fleksibel dijangkau yaitu pendidikan non formal khususnya melalui program kursus dan pelatihan.

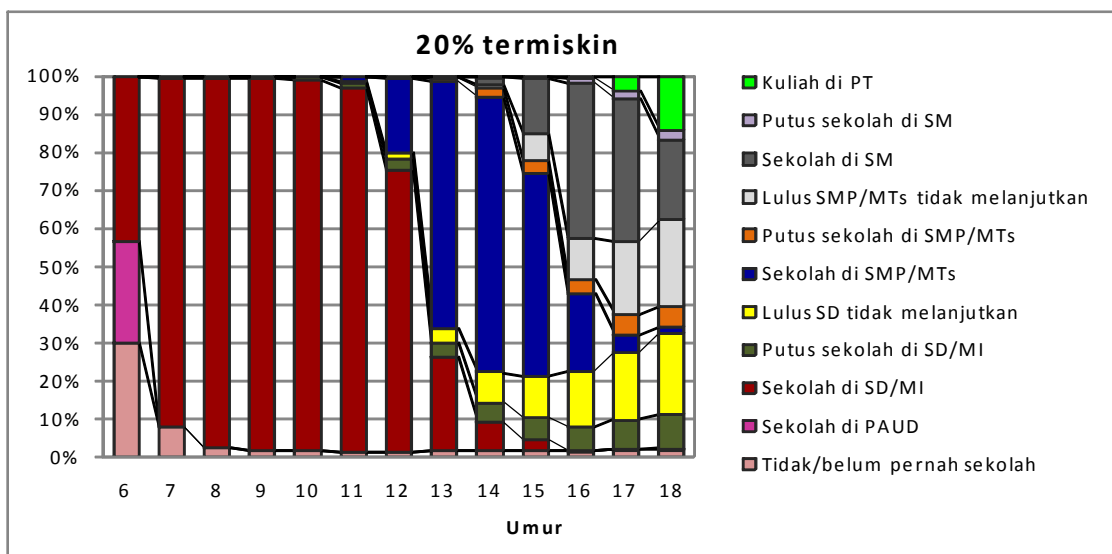
Permasalahan lain yang perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas program kursus dan pelatihan ini adalah masih banyaknya penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonominya jumlahnya masih cukup besar yang diindikasikan karena kompetensi atau skill yang stagnan bahkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga menyebabkan tidak bisa bekerja ataupun tidak bisa mendapatkan imbalan yang memadai. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada September 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta orang atau 11,47%. Penduduk miskin berdasarkan pulau sebagai berikut.





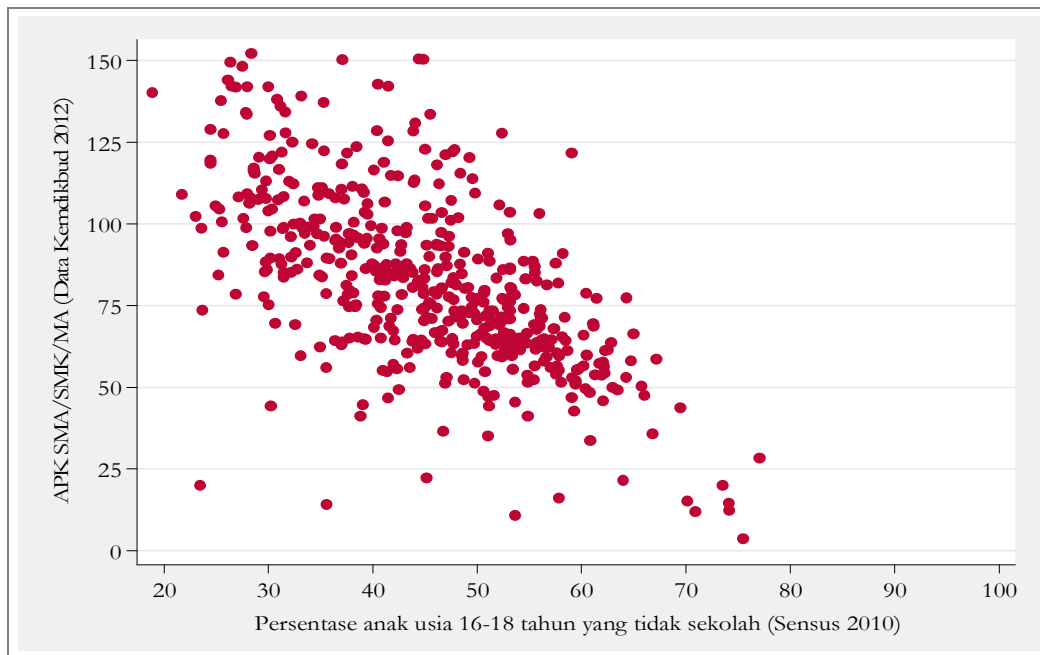
Gambar 3. Jumlah penduduk miskin berdasarkan pulau  
 Sumber : Biro Pusat Statistik, 2013

Jika masalah rendahnya partisipasi pendidikan di kalangan penduduk miskin tidak ditangani dengan baik, maka tingkat kemiskinan akan terus bertambah. Oleh karenanya peran pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk bisa diterima di dunia kerja dengan lebih baik. Alternatif tersebut juga akan efektif dikarenakan proporsi yang masih sangat rendah dari kalangan ekonomi rendah yang menjangkau pendidikan tinggi, namun demikian seperti diuraikan di atas bahwa saat ini telah dikembangkan berbagai upaya pemerintah maupun swasta untuk terus dapat meningkatkan akses penduduk miskin pada pendidikan yang lebih baik. Berikut adalah gambaran distribusi anak dari keluarga miskin berdasarkan pendidikannya.



Gambar 4. Distribusi status sekolah anak dari keluarga miskin  
 Sumber: diolah dari data Susenas 2012

Kondisi lain yang juga perlu diperbaiki adalah disparitas yang cukup signifikan di antara kabupaten di Indonesia terhadap persentase penduduk yang tidak sekolah sekaligus angka partisipasi kasar yang juga berbeda. Kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan terjadinya gap ekonomi dan sosial yang semakin tinggi diantara kabupaten/kota di Indonesia. Adapun gambaran disparitas pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 5. Plot antara persentase penduduk usia 16-18 tahun yg tidak sekolah dan APK SMA/SMK/MA di tingkat kabupaten**

Berdasarkan gambar di atas, dapat dinyatakan beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Tampak bahwa kesenjangan partisipasi pendidikan menengah antar kab/kota sangat lebar.
2. Di daerah-daerah dengan APK > 100% masih banyak anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah.
3. Perlu evaluasi mendalam tidak hanya pada kab/kota yang sangat rendah APKnya, tetapi juga pada kab/kota yang APKnya sangat tinggi.
4. Pendataan pendidikan tampaknya harus dilakukan secara lebih baik lagi untuk menghindari masalah yang tidak terlihat (APK sangat tinggi tetapi banyak anak yang tidak sekolah)

Pada tahun 50-an, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, mengalami kondisi demografis yang tidak menguntungkan. Kelahiran amat banyak, tetapi yang meninggal juga banyak. Angka pertumbuhan penduduk pun rendah. Namun dengan perkembangan teknologi obat-obatan dan program kesehatan masyarakat yang makin meningkat sejak tahun 1960 maka seperti juga banyak dialami negara berkembang lainnya, angka kematian di Indonesia kemudian menurun dengan relatif cepat, sementara angka kelahiran masih tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk Indonesia tahun 1961 adalah 97,019.000 jiwa dan pada tahun 1971 menjadi 119.232.000 jiwa.

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) meningkat dengan cepat. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang golongan usia produktif (umur 15-64 tahun). Angka beban tanggungan penduduk Indonesia tahun 1971 adalah 87, ini berarti bahwa tiap 100 orang yang produktif harus menanggung 87 orang yang tidak produktif (Anonim, 2007). Angka yang tinggi ini menjadikan beban ekonomi yang besar. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah sejak tahun 1969 melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan turut menandatangani "Deklarasi PBB tentang Kependudukan" (United Nations Declaration on Population).

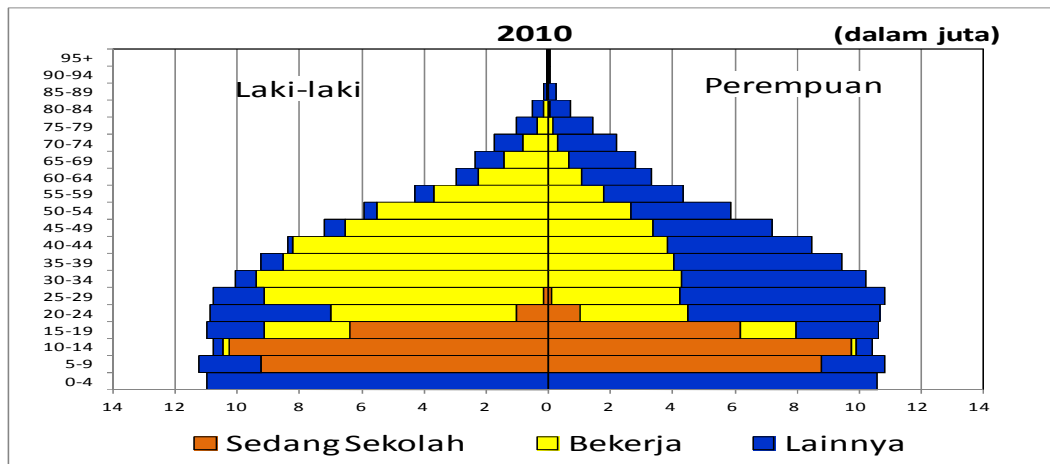
Menurut Sensus Penduduk Indonesia 1980 jumlah penduduk Indonesia sebesar kira-kira 147 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1971- 1980 sebesar 2,34 persen per tahun. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode 1980-1990 mencapai 1,97 persen per tahun dan pada periode 1990-2000 adalah sebesar 1,49 persen per tahun. Hasil survei Lembaga Demografi UI pertumbuhan penduduk tahun 2000-2005 mencapai 1,34 persen dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 1,27 persen tahun 2005-2010, 1,18 persen tahun 2010-2015 dan 1,06 persen pada 2015-2020. Perkiraan pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini didasarkan pada Survei Kependudukan dan Demografi Indonesia (SKDI) yang memperlihatkan semakin rendahnya tingkat kelahiran serta semakin meningkatnya masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana. (Menkokesra.go.id, 2008).

Dampak dari keberhasilan program KB (turunnya pertumbuhan penduduk) mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran struktur umur penduduk yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif

semakin mengecil. Keadaan ini di satu sisi mengindikasikan telah terjadi penurunan persentase penduduk sebagai beban pembangunan (dependency ratio) sementara di sisi lain juga merupakan suatu jendela kesempatan (window of opportunity) karena penduduk tidak lagi menjadi beban bahkan menguntungkan pembangunan (Bonus Demografi/BD). Diperkirakan, BD akan terentang hingga sekitar tahun 2020. Beban yang sebesar 48,9 persen (tahun 2006) diperkirakan turun menjadi 47,2 persen (tahun 2008) dan terus menurun hingga mencapai titik terendah 44,5 persen pada tahun 2017 (bappenas.2008).

Bonus demografi sebagai fenomena sosial yang harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia ; karena perkiraan jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 139.948.000 orang dan pada tahun 2024 akan mencapai 146.143.400 orang. Pemerintah harus menyiapkan anak-anak pada tahun 2019 hingga 2024 untuk masuk dalam angkatan kerja dengan menjadi calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih. Jika hanya menjadi tenaga kerja kasar seperti sekarang, bonus demografi akan menjadi musibah sebab mereka tidak mampu memberi nilai lebih ekonomi.

Ledakan angkatan kerja itu antara lain terjadi karena *baby booming* dalam beberapa tahun terakhir. Data BKKBN (2013) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir tingkat kelahiran (TFR) stagnan pada angka 2,6 artinya setiap pasangan melahirkan 2,6 bayi. Padahal, TFR selalu turun sejak tahun 1971 yang pernah mencapai angka 5,61. Disamping itu, emansipasi atau isu gender juga merupakan tuntutan global yang harus diakomodasi. Tingkat pendidikan perempuan semakin meningkat sejalan dengan waktu, namun masih belum diimbangi dengan partisipasinya dalam angkatan kerja, hal ini dapat digambarkan dalam grafik seperti gambar 7. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensinya untuk meningkatkan akses untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa.



**Gambar 6. Distribusi peran gender dalam dunia kerja**  
**Sumber: diolah dari data Sensus 2010 (IPUMS)**

Bonus demografi adalah kondisi yang menguntungkan bila dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat langka. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat atau bangsa berhasil mengubah struktur umur penduduknya dari berbentuk piramid menjadi bentuk kubah dan kemudian berubah lagi menjadi bentuk granat. Dalam perjalanan perubahan itu, akan bisa dihitung berapa banyak penduduk yang berusia produktif (15 – 59 tahun) dibanding yang berada di usia tidak produktif (0 – 14 tahun, ditambah 60 tahun ke atas). Bila suatu bangsa struktur umur penduduknya piramid atau granat maka 100 penduduk usia produktif akan disertai dengan 70 – 80 atau lebih penduduk usia tidak produktif. Hanya bedanya, kalau pada bentuk piramid yang banyak adalah anak-anak (0 – 14 tahun), dalam bentuk granat yang banyak adalah lansia (60 tahun ke atas). Suatu masyarakat dikatakan mengalami bonus demografi bila berada dalam struktur yang berbentuk kubah tadi, yakni 100 penduduk usia produktif hanya diimbangi oleh sekitar 40 – 50 penduduk usia tidak produktif.

Struktur usia penduduk Indonesia saat ini sangat menguntungkan untuk pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja relatif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk yang merupakan beban (yang masih amat muda dan yang sudah tua). Inilah kesempatan emas yang amat berharga. Disebut bonus, karena kondisi ini tidak akan bertahan lama. Angka ketergantungan muda akan terus menurun, tetapi lama kelamaan penurunannya akan makin perlahan. Di pihak lain, peningkatan angka ketergantungan tua akan meningkat dan meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu, suatu titik akan tercapai ketika peningkatan angka ketergantungan tua lebih besar daripada penurunann angka ketergantungan muda. Di saat itu,

angka ketergantungan total meningkat. Dan beban demografis pada perekonomian akan meningkat kembali.

Peran pemerintah sangat menentukan apakah bonus demografi akan memberikan dampak positif atau sebaliknya bagi Negara dan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mengembangkan potensi demografi yang salah satunya adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, menyediakan peluang kerja dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mempersiapkan SDM adalah dengan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) melalui program kursus dan pelatihan yang dipandang mampu memberi solusi praktis dan luwes (fleksibel) dalam waktu yang lebih singkat bagi masyarakat untuk menambah dan melengkapi ketrampilan atau kompetensi yang dituntut dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pekerja, profesional, pelaku usaha, dan juga pimpinan/pejabat serta fungsi atau peran lainnya.

Dengan demikian, layanan program kursus dan pelatihan adalah suatu yang mutlak dijalankan untuk menambah, melengkapi, dan bahkan mengganti kemampuan dan kompetensi warga masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Program kursus dan pelatihan tidak hanya ditempatkan untuk menggarap "masyarakat marginal" dengan segala problematika sosial-ekonominya tetapi juga menjawab kebutuhan kaum profesional dengan segala tantangan dan daya saing nasional, regional, dan internasional. Tantangan yang sekaligus menjadi peluang pengembangan program kursus dan pelatihan bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun perkembangan masyarakat global. Inilah paradigma baru program kursus dan pelatihan masa depan.

Pembinaan kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk menjawab perkembangan masyarakat untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan. Dari waktu ke waktu berbagai kegiatan produktif yang membutuhkan keterampilan vokasional semakin banyak bermunculan. Lembaga dan program kursus dan pelatihan lah yang dengan cepat dan fleksibel menangkap perubahan dan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pengelola program dan kegiatan kursus dan pelatihan sangat penting untuk memberikan bekal

dan kemampuan yang memadai dalam mengantisipasi segala kebutuhan penyediaan tenaga yang terampil, kreatif, inovatif, dan berdaya saing guna meningkatkan aktivitas usaha dan industri agar meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara internal, untuk dapat menjalankan peran dan fungsi yang semakin dinamis ke depan, program kursus dan pelatihan harus beranjak kepada wilayah penjaminan dan pengendalian mutu (*quality assurance and quality control*). Sejalan dengan itu, program layanan perluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan tetap harus dijalankan untuk menjangkau daerah tertentu yang kurang memiliki infrastruktur kursus dan pelatihan, khususnya bagi masyarakat di daerah perdesaan. Setidaknya terdapat 4 komponen yang harus menjadi dasar dalam pengembangan program dan kelembagaan kursus dan pelatihan ke depan. *Pertama*, standarisasi. Hasil identifikasi jenis dan bidang keterampilan yang berhasil dipetakan adalah 15 kelompok atau rumpun kursus dan pelatihan dengan 224 jenis kursus dan pelatihan. Sementara ini, jenis kursus yang berjalan di masyarakat baru sekitar 70 jenis kursus secara nasional, pada sejumlah provinsi, khususnya di luar Jawa berjumlah sekitar 10-15 jenis kursus. Ketiadaan standar-standar program dan kelembagaan program kursus dan pelatihan yang mencakup 8 komponen standar membuat ekspansi dan terobosan layanan kursus dan pelatihan kurang berkembang. Pengembangan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar sarana/prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian untuk setiap jenis kursus dan pelatihan mendesak untuk dirumuskan. Untuk itu, perlu kerjasama dan sinergi antara Direktorat Binsulat dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama asosiasi profesi dan organisasi mitra kursus dan pelatihan. Perubahan dan pembaruan (*updating*) standar kompetensi dan perumusan strategi kursus dan pelatihan harus seringkali kali agar lulusan yang dihasilkan dapat sepenuhnya diterima dunia usaha dan industri.

*Kedua*, Akreditasi, kegiatan akreditasi dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk menteri untuk menilai kelayakan program dan lembaga kursus dan pelatihan dalam penerapan standar-standar tersebut. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 ayat 1). Proses akreditasi juga menjadi bagian dari penjaminan mutu (*quality assurance*)

untuk memastikan bahwa program dan satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan program PNF, khususnya program kursus dan pelatihan. Bahwa program dan satuan kursus dan pelatihan harus dijamin dan dipastikan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan.

Ketiga, Sertifikasi. Kegiatan sertifikasi dilakukan dalam rangka menilai kemampuan dan kompetensi para lulusan kursus dan pelatihan dalam memenuhi Standar Kompetensi Lulusan pada setiap jenis program kursus dan pelatihan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi. Dengan sertifikasi, para pengguna lulusan dari dunia industri maupun masyarakat yang menggunakan jasa lulusan kursus dan pelatihan dapat dijamin layanannya. UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 61 ayat 3 menyatakan: Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Orang yang tidak memiliki sertifikat kompetensi akan sulit diterima dunia usaha dan industri untuk bekerja. Seperti halnya di negara Jerman, bahwa seseorang dibolehkan membuka usaha jika memiliki sertifikat "master" untuk keahlian tertentu sesuai dengan usaha yang dijalankannya.

Keempat, Evaluasi. Kegiatan evaluasi atau penilaian dilakukan dalam rangka memberikan justifikasi terhadap proses pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kursus dan pelatihan. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan juga PP Nomor 32 tahun 2010 tentang perubahannya. Evaluasi kinerja satuan kursus dan pelatihan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban publik untuk menjamin kualitas.

Dalam menghadapi era MEA yang penuh dengan persaingan, SDM yang berkualitas harus disiapkan karena masih banyak industri padat karya yang kekurangan tenaga kompeten sehingga berpengaruh kepada produktivitasnya, apalagi pada industri yang menggunakan teknologi tinggi. Hal ini akan membuka peluang masuknya tenaga kerja asing untuk menggantikan tenaga kerja Indonesia tersebut. Selain itu, persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA 2015, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*);



2. Rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja;
3. Pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah;
4. Meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
5. Ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi;
6. Sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah;
7. Pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota Asean ;
8. Ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015;
9. Tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
10. Masalah tenaga kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

Kesiapan yang perlu dilakukan suatu negara, antara lain menyiapkan infrastruktur, menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan berinvestasi, memberikan servis yang baik pada investor asing dan mempermudah informasi. Pemerintah perlu mengupayakan pembenahan infrastruktur guna menunjang terciptanya tatanan masyarakat MEA. Menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan berinvestasi. Kebijakan-kebijakan baru yang lebih luwes terhadap peraturan-peraturan MEA disini sangat diharapkan. Dengan memperhatikan manfaat untuk semua pihak bukan hanya untuk para pelaku ekonomi menengah ke atas, namun juga pelaku ekonomi menengah ke bawah guna tercapainya perekonomian yang stabil di Indonesia. Baik dalam pelaksanaan usaha kecil, menengah, maupun besar sekaligus. Sehingga terjadi pemerataan perekonomian di Indonesia. Dan semua berjalan beriringan dalam menghadapi MEA. Selain itu pemberian servis yang baik kepada para investor asing dan mempermudah informasi juga dapat meningkatkan arus kegiatan investasi yang memberikan banyak manfaat untuk Indonesia.

Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan pada perekonomian Indonesia sendiri untuk mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan dan

memperkuat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja, baik dalam memasuki dunia kerja maupun menciptakan wirausahawan yang handal. Kesadaran semua lapisan masyarakat disini juga sangat diperlukan. Kesadaran ini dapat dibentuk dengan gencarnya sosialisasi tentang MEA. Perlu juga dilakukan sosialisasi pada tahap pendidikan, agar generasi muda mampu memahami arti penting dari MEA sehingga mereka dapat berpartisipasi guna terwujudnya masyarakat ekonomi asean. Pada dasarnya keterlibatan semua pihak dapat mempercepat tercapainya kesiapan bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam MEA.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang mampu mendorong kesiapan lembaga-lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia untuk dapat bersaing dengan masuknya lembaga asing dan menghasilkan lulusan yang juga mampu bersaing. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka mendorong dan menyiapkan lembaga kursus dan pelatihan untuk menghadapi globalisasi ini, antara lain:

1. Menata sistem perizinan dengan aturan yang jelas dan melakukan filterisasi terhadap masuknya lembaga asing di Indonesia sebagai langkah awal membina lembaga;
2. Melakukan standarisasi program yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri. Penyusunan standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis kompetensi yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi nasional Indonesia;
3. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kursus dan pelatihan untuk mengikuti akreditasi sebagai wujud pengakuan suatu lembaga yang memenuhi standar sebuah lembaga;
4. Mendorong lembaga kursus dan pelatihan agar siap menghasilkan lulusan yang bermutu dan mendorong sertifikasi terhadap peserta didik sebagai wujud pengakuan kompetensi peserta didik.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keempat hal di atas agar dapat tercapai secara meluas, merata, bermutu, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Lembaga kursus dan pelatihan tentunya harus berbenah diri dengan menata mutu program dan layanannya. Dengan kata lain, lembaga harus meningkatkan daya tarik terhadap peserta didik dan meningkatkan daya saing lembaga. Indikator utama sebuah lembaga kursus

dan pelatihan akan hidup dan berkembang apabila *trend* peserta didiknya terus mengalami peningkatan. Sedangkan indikator sebuah lembaga kursus dan pelatihan dikatakan bermutu apabila mampu mensejajarkan diri dengan lembaga lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan baru dalam bentuk kompetisi.

## **B. Landasan Filosofis**

Implikasi Pancasila sebagai dasar negara sebagai landasan filosofis pada pengembangan kursus dan pelatihan adalah; (1) lembaga Kursus dan Pelatihan harus menjadi wahana penanaman, penumbuhan, dan pengembangan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar harus tumbuh di atas landasan moral Pancasila; (2) Lembaga Kursus dan Pelatihan harus dibina dan dikembangkan sebagai wahana pendidikan bagi semua dan pendidikan berkelanjutan untuk membentuk karakter bangsa tempat bersemayamnya nilai-nilai Pancasila; (3) Lembaga kursus dan pelatihan dibina dan dikembangkan menjadi lembaga pendidikan yang terbuka, berakar di masyarakat, untuk mengokohkan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia.

## **C. Landasan Hukum**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Implikasinya pada pembinaan dan pengembangan Kursus dan Pelatihan adalah: (1) Kursus dibina dan dikembangkan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminatif dalam rangka "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" Kursus dan Pelatihan dibina dan dikembangkan sebagai wahana pendidikan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat agar memiliki kemampuan prima untuk *mengembangkan diri, bekerja pada dunia kerja, bekerja mandiri, berwirausaha, memenuhi kebutuhan belajar yang tidak bias dipenuhi oleh lembaga pendidikan pada system persekolahan, dan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi*; (2) Merujuk pada ketentuan bahwa "*Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*". Dengan melihat fakta bahwa masyarakat desa masih menghadapi kendala untuk mengakses layanan pendidikan, maka memperluas dan mempercepat layanan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesetaraan, pendidikan vokasi, pendidikan kewirausahaan harus masuk ke desa. Tiga tipologi desa dengan pendekatan geografis yang harus menjadi *sasaran strategis* percepatan dan perluasan pengembangan layanan kursus dan pelatihan adalah "*desa pantai,*

*desa pertanian, desa pinggiran hutan dan pegunungan, desa pasca korban bencana, dan desa di pulau kecil terdepan.*

#### **D. Landasan Historis**

Kursus dan pelatihan dalam perjalanan sejarah pendidikan nasional, khususnya yang terkait dengan isu sentral saat ini dalam konteks luaran atau hasil pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha yang menitikberatkan pada terpenuhinya standar kompetensi. Sejak diberlakukannya Ujian Nasional Kursus pada era tahun 1960-an, lembaga kursus adalah lembaga pendidikan pertama yang melaksanakan ujian nasional berbasis kompetensi. Untuk kepentingan memasuki dunia kerja, siswa, mahasiswa, dan bahkan mereka yang sudah bekerja menambah pengetahuan, keterampilannya pada Lembaga Kursus, dan mengikuti ujian nasional yang ijazahnya menjadi paspor untuk memasuki dunia kerja. Penyusunan Kurikulum, penetapan pendidikan, penyusunan soal ujian, ujian teori dan praktek telah melibatkan Quadro Helix yaitu: pemerintah, profesional dari dunia usaha dan industri, asosiasi profesi, komunitas pendidik dan penguji yang telah memiliki sertifikat sebagai penguji teori dan praktek. Butir-butir yang memberikan landasan historis antara lain; 1) Pengembangan Jenis Kursus selalu berorientasi atas permintaan pasar kerja dan dunia Profesi; 2) Jenjang kursus selalu berdasarkan pada jenjang kompetensi pada jabatan kerja pada bidang pekerjaan/profesi tertentu; 3) Dalam pengujian dilakukan dua jenis ujian yaitu teori dan praktek; dan 4) Penguji praktek hanya bisa dilakukan oleh penguji yang telah memiliki ijazah/sertifikat penguji pada jenjang/tingkat kompetensi tertentu melalui ujian yang terstruktur pada semua jenis keterampilan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TATA NILAI**

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) merupakan salah satu Direktorat yang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang telah memiliki visi dan misi yang selaras dengan Visi dan misi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu sebagai landasan operasionalnya, Ditbinsus juga memiliki cita-cita yang dituangkan dalam visi dan misi yang ingin dicapai selama periode lima tahun yaitu 2015-2019 dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan unit-unit di atasnya dan dinyatakan dalam dokumen Rencana Strategis Ditbinsus.

Renstra Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan periode 2015-2019 disusun dengan semangat untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian keselarasan dan harmonisasi perlu ditekankan dalam pernyataan visi, misi dan tujuan serta strategi inisiatifnya. Pada bagian ini akan diuraikan visi, misi dan tujuan Ditbinsus selama periode 2015 - 2019.

#### **Visi :**

Terselenggaranya layanan pendidikan KURSUS DAN PELATIHAN untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri, dan profesional”

Visi di atas sekaligus merupakan pernyataan cita-cita Ditbinsus untuk membangun pendidikan kursus dan pelatihan yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan di masa depan. Agar visi yang ditetapkan dapat tercapai dengan efektif, maka perlu diturunkan dalam pernyataan misi yang lebih bersifat operasional yang akan dinyatakan pada bagian berikutnya.

#### **Misi :**

Misi Ditbinsus adalah memfasilitasi layanan pendidikan kursus dan pelatihan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Misi tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kursus dan pelatihan yang bermutu dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki dunia kerja maupun pendidikan lanjutan baik formal maupun informal.
2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kursus dan pelatihan yang bermutu bagi seluruh masyarakat berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kursus dan pelatihan, dan pemberdayaan perempuan yang bermutu, berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berkesetaraan gender untuk pengembangan berkelanjutan, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
4. Memastikan dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan program kursus dan pelatihan serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kemandirian.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kerjangkauan layanan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan dan secara berkelanjutan.

### **Tata Nilai**

Merujuk kepada tata nilai yang dikembangkan oleh Kemendiikbud dan Direktorat Jenderal PAUDNI, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan siap mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dibangun dalam rangka pelayanan prima adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

### BAB III

#### ANALISA KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Perencanaan strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan harus mampu mengantisipasi dan merespons dinamika perubahan lingkungan agar pencapaian visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif sebagai landasan dalam menyusun Rencana Strategi Direktorat. Analisis kemampuan dijabarkan sebagai analisis kondisi internal, sementara perubahan lingkungan ditulis sebagai analisis kondisi eksternal. Hasil analisis internal dan eksternal ini selanjutnya bisa dipetakan dalam bentuk matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) yang menjadi salah satu dasar dalam perumusan strategis. Disamping itu, hasil analisis internal dan eksternal akan dapat memunculkan isu strategis yang dihadapi dalam beberapa tahun mendatang yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam perumusan strategi inisiatif untuk pencapaian visi dan misi.

#### A. Kondisi Internal

##### 1. Kelembagaan Kursus dan Pelatihan

Layanan pendidikan melalui program kursus dan pelatihan telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2014, jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang telah memiliki izin operasional sebanyak 18.456 lembaga, sedangkan yang telah tervalidasi datanya sebanyak 11.971 lembaga. Jumlah ini meningkat dari 17.986 LKP dan yang tervalidasi sebanyak 11.395 lembaga pada tahun 2013 dengan distribusi pada setiap propinsi yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan menurut provinsi

NO.	PROVINSI	2013			
		JUMLAH LKP	TERVALIDASI		BELUM VALIDASI
			JUMLAH	%	
1	ACEH	390	241	61.79	149
2	SUMATERA UTARA	1,647	926	56.22	721
3	SUMATERA BARAT	326	224	68.71	102
4	RIAU	268	170	63.43	98
5	KEPULAUAN RIAU	296	125	42.23	171
6	JAMBI	354	201	56.78	153
7	BENGGKULU	250	182	72.80	68

NO.	PROVINSI	2013			
		JUMLAH LKP	TERVALIDASI		BELUM VALIDASI
			JUMLAH	%	
8	SUMATERA SELATAN	528	252	47.73	276
9	BANGKA BELITUNG	151	96	63.58	55
10	LAMPUNG	592	327	55.24	265
11	BANTEN	423	322	76.12	101
12	DKI JAKARTA	774	489	63.18	285
13	JAWA BARAT	2,600	1,680	64.62	920
14	JAWA TENGAH	2,077	1,420	68.37	657
15	D.I. YOGYAKARTA	294	212	72.11	82
16	JAWA TIMUR	2,998	2,003	66.81	995
17	BALI	543	368	67.77	175
18	NUSA TENGGARA BARAT	484	317	65.50	167
19	NUSA TENGGARA TIMUR	421	241	57.24	180
20	KALIMANTAN BARAT	250	162	64.80	88
21	KALIMANTAN TENGAH	136	104	76.47	32
22	KALIMANTAN SELATAN	307	240	78.18	67
23	KALIMANTAN TIMUR	336	210	62.50	126
24	SULAWESI UTARA	302	199	65.89	103
25	GORONTALO	96	76	79.17	20
26	SULAWESI TENGAH	375	307	81.87	68
27	SULAWESI SELATAN	535	414	77.38	121
28	SULAWESI BARAT	173	150	86.71	23
29	SULAWESI TENGGARA	237	140	59.07	97
30	MALUKU	86	58	67.44	28
31	MALUKU UTARA	131	60	45.80	71
32	PAPUA	50	34	68.00	16
33	PAPUA BARAT	28	21	75.00	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,458</b>	<b>11,971</b>	<b>64.86</b>	<b>6,487</b>

Sumber: <http://www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus/>

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan kursus dan pelatihan telah dilakukan melalui Penilaian Kinerja terhadap lembaga. Jumlah lembaga yang dinilai kinerjanya pada tahun 2009 s.d. 2013 sebanyak 5.967 LKP, dengan hasil kinerja A sebanyak 63 lembaga, Kinerja B sebanyak 645 lembaga, kinerja C sebanyak 2.665 lembaga, kinerja D sebanyak 2.308 lembaga, dan *non classified* sebanyak 286 lembaga. Adapun distribusi kinerja lembaga dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.



**Tabel 2. Jumlah lembaga dan hasil penilaian kinerja lembaga dalam kurun waktu 5 tahun**

KINERJA	TAHUN					JUMLAH
	2009	2010	2011	2012	2013*)	
Kinerja A	17	7	10	9	20	63
Kinerja B	189	68	106	122	160	645
Kinerja C	348	297	709	700	611	2,665
Kinerja D	142	390	623	670	483	2,308
NC	25	17	43	2	199	286
<b>JUMLAH</b>	<b>721</b>	<b>779</b>	<b>1,491</b>	<b>1,503</b>	<b>1,473</b>	<b>5,967</b>

Sumber: Diolah dari hasil Penilaian Kinerja, 2009-2013.

Penilaian kinerja ini dilakukan dengan melibatkan unsur pamong belajar dari 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (UPT P2-PAUDNI) dan UPT Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI). Sementara itu distribusi nilai kinerja lembaga berdasarkan Propinsi dapat disajikan pada Tabel 3 berikut .

**Tabel 3. Hasil penilaian kinerja menurut provinsi di Indonesia**

NO	PROVINSI	A	B	C	D	NC	JUMLAH
1	ACEH	-	5	34	60	11	110
2	SUMATERA UTARA	1	25	211	266	38	541
3	SUMATERA BARAT	-	11	37	58	10	116
4	RIAU	1	5	37	35	4	82
5	JAMBI	-	2	40	61	6	109
7	SUMATERA SELATAN	2	9	52	99	24	186
9	KEPULAUAN RIAU	2	5	28	42	8	85
6	BENGKULU	-	7	46	36	6	95
8	LAMPUNG	-	17	100	57	5	179
10	BANGKA BELITUNG	-	2	18	29	1	50
11	JAWA BARAT	10	125	483	209	15	842
12	BANTEN	1	25	87	30	2	145
13	DKI JAKARTA	6	34	130	76	22	268
14	JAWA TENGAH	12	107	365	184	8	676
15	DI YOGYAKARTA	3	25	49	17	2	96

NO	PROVINSI	A	B	C	D	NC	JUMLAH
20	KALIMANTAN BARAT	-	3	41	42	4	90
16	JAWA TIMUR	15	108	418	411	41	993
17	BALI	4	28	71	60	3	166
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	5	27	76	14	122
23	KALIMANTAN TIMUR	1	11	47	42	7	108
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	12	52	79	8	152
21	KALIMANTAN TENGAH	2	10	19	13	2	46
22	KALIMANTAN SELATAN	1	9	40	47	4	101
24	SULAWESI UTARA	-	8	33	42	8	91
25	GORONTALO	-	5	11	20	1	37
26	SULAWESI TENGAH	-	11	38	48	6	103
27	SULAWESI TENGGARA	-	5	25	35	4	69
28	SULAWESI BARAT	-	4	17	21	3	45
29	SULAWESI SELATAN	1	21	81	71	2	176
30	MALUKU	-	1	12	17	-	30
31	MALUKU UTARA	-	2	6	23	7	38
32	PAPUA	-	-	15	10	6	31
33	PAPUA BARAT	-	-	-	3	8	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>63</b>	<b>647</b>	<b>2,670</b>	<b>2,319</b>	<b>290</b>	<b>5,989</b>

Program kursus dan pelatihan juga diselenggarakan pada satuan pendidikan nonformal lainnya, diantaranya oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Jumlah SKB dan PKBM yang ada menurut provinsi sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah SKB dan PKBM yang ada menurut provinsi di Indonesia**

NO.	PROVINSI	JUMLAH PKBM	Jumlah SKB
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	164	
2.	Sumatera Utara	475	
3.	Sumatera Barat	273	
4.	Riau	106	
5.	Jambi	97	
6.	Sumatera Selatan	231	
7.	Bengkulu	269	
8.	Lampung	283	
9.	Kepulauan Bangka Belitung	54	

NO.	PROVINSI	JUMLAH PKBM	Jumlah SKB
10.	Kepulauan Riau	134	
11.	Dki Jakarta	273	
12.	Jawa Barat	1415	
13.	Jawa Tengah	630	
14.	D I Yogyakarta	229	
15.	Jawa Timur	1050	
16.	Banten	205	
17.	Bali	83	
18.	Nusa Tenggara Barat	534	
19.	Nusa Tenggara Timur	127	
20.	Kalimantan Barat	171	
21.	Kalimantan Tengah	61	
22.	Kalimantan Selatan	190	
23.	Kalimantan Timur	136	
24.	Kalimantan Utara	60	
25.	Sulawesi Utara	84	
26.	Sulawesi Tengah	106	
27.	Sulawesi Selatan	549	
28.	Sulawesi Tenggara	211	
29.	Gorontalo	89	
30.	Sulawesi Barat	177	
31.	Maluku	26	
32.	Maluku Utara	62	
33.	Papua Barat	68	
34.	Papua	185	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,807</b>	

## 2. Mutu dan Relevansi

Berdasarkan hasil akreditasi terhadap kursus dan pelatihan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF), jumlah lembaga yang terakreditasi sebanyak 121 lembaga dan yang terakreditasi programnya sebanyak 1.154 lembaga. Pengendalian kualitas penyelenggaraan kursus dan pelatihan telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui penilaian kinerja dan juga penilaian akreditasi penyelenggaraan program. Jenis keterampilan yang telah ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 36 jenis keterampilan, 29 diantaranya disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Jumlah Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebanyak 35 jenis keterampilan. Jumlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebanyak 33 jenis keterampilan. Jenis keterampilan yang telah ada SKKNI, SKL, dan KBK-nya sebagai berikut.

Tabel 5. Jenis Keterampilan yang telah ada SKKNI, SKL, dan KBK

NO	JENIS KURSUS	SKKNI	SKL					KBK				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Komputer	√	√					√				
2.	Bahasa Inggris	√	√					√				
3.	Pengobat Tradisional Ramuan	√		√						√		
4.	Bahasa Arab	√			√							
5.	Bahasa Mandarin	√			√					√		
6.	Pendidik PAUD	√			√					√		
7.	Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan	√				√					√	
8.	Menjahit	√				√					√	
9.	Tata Kecantikan Rambut	√				√					√	
10.	Tata Rias Pengantin	√				√					√	
11.	Tata Kecantikan Kulit	√				√					√	
12.	Otomotif	√				√					√	
13.	Tata Boga	√				√					√	
14.	Seni Musik	√				√					√	
15.	Akuntansi	√				√					√	
16.	Bahasa Jepang	√				√					√	
17.	Hantaran	√				√					√	
18.	Spa	√				√					√	
19.	Perhotelan	√				√					√	
20.	Senam	√				√					√	
21.	Merangkai Bunga Segar	√				√					√	
22.	Akupunktur	√				√					√	
23.	Broadcasting (Penyiar)	√				√					√	
24.	Kameramen	√				√					√	
25.	Video Editing	√				√					√	
26.	Ekspor Impor	√				√					√	
27.	Public Speaking/MC	√					√					√

NO	JENIS KURSUS	SKKNI	SKL					KBK				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
28.	Perpajakan	√					√					√
29.	Sekretaris	√					√					√
30.	Baby Sitter	√					√					√
31.	Bordir dan Sulam	√					√					√
32.	Mengemudi	√					√					√
33.	Refleksi	√					√					√
34.	Public Relation (Humas)	√					√					
35.	Merancang Mode	√										
36.	Elektronika	√										
37.	Shinse						√					√
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>8</b>

Selain penyusunan SKKNI, SKL, dan KBK juga telah disusun bahan ajar berbagai jenis keterampilan. Jenis-jenis keterampilan yang telah disusun bahan ajarnya sebagai berikut.

**Tabel 6. Jenis Keterampilan yang telah disusun Bahan Ajar**

No.	Bidang Keterampilan	Jumlah Judul	Level/Paket	Judul
1	Broadcasting	1	Level III	Teknologi Video Editing : "Teknologi Video Editing & Proses Produksi Televisi/Video" (Level III)
2	Mengemudi	1	Level II	Teknik Mengemudi Aman Bagi Pemula (Level II)
3	Otomotif Sepeda Motor	1	Level II	Dasar Teknik Sepeda Motor I (level II)
4	Akupunktur	1	Level II	Teori Dasar Ilmu Akupunktur Level II
5	Spa	1	Level II	Hidroterapi untuk Spa: Mandi Berendam dan Penguapan Badan (Level II)
6	Tata Boga	1	Level II	Persiapan Pengolahan Makanan
7	Tata Busana	1	Level II	Siap Menjahit dan Mengenal Tekstil (Level II)

No.	Bidang Keterampilan	Jumlah Judul	Level/Paket	Judul
8	Tata Kecantikan Kulit	1	Level IV	Merawat Wajah dengan Teknologi Alat Listrik (Level IV)
9	Tata Kecantikan Rambut	1	Level II	Menata Sanggul Hairpiece dan Memasanginya di Kepala
10	Tata Rias Pengantin	1	Level I	Peran dan Tugas Perias Pemula (Level I)

Pada tahun 2013 jumlah bahan ajar audio visual yang telah disusun sebanyak 100 judul untuk 10 jenis keterampilan. Daftar jenis keterampilan yang telah disusun bahan ajar audio-visualnya terlampir. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, uji kompetensi sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang sistem pendidikan merupakan suatu bagian penting dalam bentuk sertifikasi bagi peserta didik. Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang telah terbentuk hingga tahun 2014 sebanyak 30 jenis keterampilan. Jumlah Tempat Uji Kompetensi yang telah terbentuk sebanyak 825 TUK yang tersebar di kabupaten/kota di Indonesia. Daftar LSK dan jumlah TUK yang telah terbentuk sebagai berikut:

**Tabel 7. Daftar LSK dan Jumlah TUK**

NO.	JENIS KURSUS	NAMA LSK	JUMLAH TUK
1	Tata Kecantikan Rambut	Tata Kecantikan	137
2	Tata Rias Pengantin	Tata Rias Pengantin	111
3	Komputer	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	100
4	Menjahit	Tata Busana	74
5	Akuntansi	Teknisi Akuntansi Bond'09	70
6	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris (BIG)	66
7	Hantaran	Hantaran	61
8	Sekretaris	Sekretaris	34
9	Spa	Spa	32
10	Tata Boga	Tata Boga	28
11	Tata Kecantikan Kulit	Tata Kecantikan	21
12	Otomotif	Otomotif	21
13	Bordir dan Sulam	Bordir dan Sulam	15
14	Merangkai Bunga Segar	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	11

NO.	JENIS KURSUS	NAMA LSK	JUMLAH TUK
15	Ekspor Impor	Ekspor Impor	11
16	Akupunktur	Akupunktur	9
17	Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin Indonesia	5
18	Shinse	Sinse	5
19	Pengobat Tradisional Ramuan	Pengobat Tradisional (Batra) Ramuan	5
20	Broadcasting (Penyiar)	Penyiaran (Broadcasting)	4
21	Mengemudi	Mengemudi Kendaraan Bermotor	2
22	Seni Musik	Musik	2
23	Senam	Senam Indonesia	1
24	Baby Sitter	Baby Sitter	0
25	Pendidik PAUD	Pendidik PAUD	0
26	Public Relation (Humas)	Hubungan Masyarakat Indonesia	0
		<b>Jumlah</b>	<b>825</b>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi hasil analisis internal berupa kekuatan dan kelemahan Ditbinsus sebagai basis dalam penyusunan strategi dengan memperhatikan hasil analisis eksternal yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

## B. Kondisi Eksternal

Perkembangan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan disamping dipengaruhi oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal Institusi. Analisis eksternal dilakukan untuk mengantisipasi dampak kondisi eksternal yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Direktorat. Analisis ini dilakukan terhadap beberapa aspek eksternal diantaranya adalah perubahan politik, ekonomi, sosial, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan persaingan global. Sebagai pembina seluruh lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Indonesia, kinerja Ditbinsus akan dipengaruhi oleh berbagai perubahan aspek eksternal tersebut baik nasional maupun internasional. Analisis lingkungan eksternal berikut ini merupakan analisis tentang kondisi-kondisi penting yang sangat berpengaruh pada sistem dan performansi Ditbinsus sebagai sebuah Institusi yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 1. Sosial, budaya, dan lingkungan Masyarakat

Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan mempengaruhi penguasaan keterampilan dan daya saing masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi tersebut antara lain; a) meskipun jumlah penganggur terbuka makin menurun namun jumlahnya masih cukup besar, b) kemampuan daya beli masyarakat terhadap kompetensi keterampilan yang dimilikinya tidak terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, c) pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterampilan masih rendah, dan d) lembaga kursus dan pelatihan pada umumnya berada di perkotaan, sehingga masyarakat di pedesaan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan.

### 2. Otonomi Daerah

Peran pemerintah dalam mendorong dan menumbuhkan program-program kursus dan pelatihan masih sangat kecil. Kursus dan pelatihan masih menjadi bagian yang tidak terlalu penting dalam program pendidikan.

Beberapa hal yang masih terjadi di beberapa daerah, antara lain; a) sistem perizinan yang sangat panjang birokrasinya dan biaya perizinan yang cukup tinggi menghambat tumbuhnya lembaga-lembaga baru, b) diskriminasi dalam proses perizinan, c) pemahaman terhadap program-program kursus dan pelatihan masih lemah, ditambah lagi pergantian pejabat yang membina kursus dan pelatihan begitu sering, dan d) meskipun di beberapa daerah dukungan APBD cukup tinggi, namun di berbagai daerah anggaran untuk program-program pembinaan kursus dan pelatihan sangat kecil dan bahkan tidak ada dukungan anggaran sama sekali terhadap program-program kursus dan pelatihan.

### 3. Perkembangan Kebijakan Pembangunan Nasional

Salah satu aspek eksternal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Ditbinsus agar terjadi alignment dan efektivitas dalam memberikan kontribusi dan dukungan adalah kebijakan-kebijakan terkait pembangunan nasional jangka panjang. Salah satu kebijakan pembangunan nasional yang komprehensif yang telah dinyatakan oleh pemerintah saat ini adalah Nawacita yang telah diuraikan dalam



dokumen Rencana Strategis di Kementerian Pendidikan Nasional dan juga kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih relevan untuk dijadikan rujukan khususnya untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam merencanakan penyediaan tenaga trampil di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan kompetensi di wilayah masing-masing.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, MP3EI dan Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 dan Rencana Strategi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Informal dan Non Formal (Paudni), maka disusunlah Rencana Strategi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku.

Dalam naskah MP3EI telah ditetapkan tiga tema pengembangan potensi ekonomi secara nasional yaitu (1) mengembangkan Potensi Ekonomi Melalui Koridor Ekonomi, (2) memperkuat konektivitas nasional, dan (3) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Iptek Nasional. Dalam naskah MP3EI telah dinyatakan bahwa dalam implementasi strateginya akan membagi wilayah Ekonomi Indonesia dalam 6 (enam) koridor ekonomi dengan masing-masing fokus pengembangan. Ketiga tema strategis tersebut sangat relevan dengan fungsi dan peran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai bagian dari Kemendikbud agar mampu melayani dan menjamin ketersediaan tenaga trampil yang berkualitas yang akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam implementasi MP3EI. Ditbinsus harus mampu memfasilitasi lembaga-lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) dan lembaga pendidikan masyarakat lainnya untuk bisa menjamin tersedianya SDM yang andal yang mampu mendukung pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui intervensi teknologi.

Kebijakan MP3EI juga sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk terus memacu daerah dalam mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan keunggulan di daerah tersebut. Perguruan Tinggi yang ada pada suatu daerah akan menjadi resources yang strategis

untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional ini. Pemetaan kebutuhan dukungan SDM berdasarkan kebutuhan diseluruh wilayah Bangsa Indonesia perlu dilakukan untuk menyusun program fasilitasi yang efektif dan efisien.

#### 4. Persaingan di tingkat global

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, tersirat bahwa satuan pendidikan nonformal merupakan satuan pendidikan yang tidak diwajibkan berbentuk nirlaba. Artinya, satuan pendidikan nonformal merupakan salah satuan pendidikan yang dapat berbentuk profit dan dapat mengakses investasi modal asing.

Kenyataan menunjukkan bahwa investasi asing dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan telah banyak terjadi, sehingga menuntut regulasi dan sikap yang positif bagi terciptanya iklim yang kondusif penyelenggaraan kursus dan pelatihan di Indonesia dalam rangka persaingan global. Beberapa hal yang perlu diatur masuknya lembaga asing di Indonesia, diantaranya; a) bentuk-bentuk kerjasama antara lembaga kursus dan pelatihan Indonesia dengan lembaga asing, b) sistem perizinan masuknya lembaga asing di Indonesia, c) ruang lingkup kerjasama, d) filterisasi aspek-aspek kerjasama dengan lembaga asing, e) fasilitasi kompetisi dan kerjasama tingkat internasional, dan f) monitoring dan evaluasi terhadap masuknya lembaga asing di Indonesia.

### **C. Tren Kebutuhan Pendidikan dan Dunia Kerja/Dunia Usaha**

Trend Kebutuhan Pendidikan, didasarkan pada fakta bahwa; 1) masyarakat memerlukan pendidikan berbasis kompetensi untuk mengembangkan diri, bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 2) Pada dunia yang semakin rata dengan polarisasi MEA, APEC, dan Pola Internasionalisasi lainnya, akses dunia kerja bukan hanya pada tataran lokal, domestik dan nasional, tapi juga pada tataran internasional. Standarisasi kompetensi yang diperlukan bukan hanya standar nasional, tapi juga standar internasional, 3) Pengentasan pengangguran dan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masih memerlukan upaya yang lebih kontributif berupa pendidikan kecakapan hidup dan terutama pendidikan kewirausahaan. Kursus sangat berpotensi menjadi lembaga pengembang

pendidikan kewirausahaan yang terbuka bagi berbagai segmen masyarakat utamanya kelompok masyarakat usia produktif pencari kerja, pemuda putus sekolah, kaum perempuan, dan yang masuk dalam katagori pengangguran.

#### **D. Tantangan Pembinaan Kursus dan Pelatihan**

Tantangan yang dihadapi dalam pembinaan kursus dan pelatihan saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak angkatan kerja muda belum memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan untuk bekerja dan berwirausaha;
2. Masih banyak lembaga kursus dan pealtihan yang belum terakreditasi
3. Masih banyak lembaga kursus dan pelatihan yang belum memenuhi terstandar
4. Masih banyak program kursus dan pelatihan yang belum memenuhi standar
5. Masih banyak lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang belum memperoleh bantuan penguatan kelembagaan
6. Masih banyaknya program kursus yang belum mengacu pada standar kompetensi kerja
7. Jumlah TUK dan penguji uji kompetensi masih terbatas dan belum merata penyebarannya
8. Kualitas pengelolaan lembaga kursus masih variatif
9. Masih banyak peserta didik dan masyarakat tidak mengikuti uji kompetensi karena faktor biaya
10. Masih terbatasnya penghargaan yang diberikan kepada lembaga maupun peserta didik yang berprestasi;

## BAB IV

### ARAH DAN STRATEGI PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2015-2019

#### A. Nawacita Presiden Republik Indonesia

Di dalam Visi Pemerintahan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan sejumlah misi yang telah dijabarkan dalam dokumen pemerintahan Indonesia, merupakan pernyataan tegas bahwa peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui **peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan** serta **peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja** menjadi bagian penting, seperti tertera dalam nawacita ke-5. Selain itu, juga pada nawacita ke-6 peningkatan **produktivitas rakyat** dan **daya saing di pasar Internasional** sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang merupakan salah satu unit dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanah untuk menselaraskan arah dan gerak pembinaan kursus dan pelatihan yang selaras dengan visi pemerintahan tersebut di atas dan telah dinyatakan pada bagian visi, misi dan tatanilai. Lembaga pendidikan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan dunia kerja dan berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi Bangsa. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM Bangsa Indonesia harus diakui secara penuh oleh dunia usaha/industri baik lokal, regional, nasional maupun global. Hal ini merupakan bagian penting dalam kerangka kebijakan khususnya menyongsong MEA pada akhir tahun 2016 dan persaingan global lainnya yang akan segera menyusul di masa depan.

#### B. Sasaran Strategis

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai arah operasionalisasi program-program yang telah dikembangkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja usia muda yang tidak bersekolah, miskin, dan menganggur;

2. Meningkatnya produktivitas masyarakat dalam memasuki dunia kerja atau berwirausaha;
3. Meningkatnya standar penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam meningkatkan layanan program kursus dan pelatihan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan yang kompeten dan menerima penghargaan bidang kompetensi di tingkat internasional.

### C. Indikator Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan beberapa indikator setiap sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses layanan kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja usia muda yang tidak bersekolah, miskin, dan menganggur; akan diukur keberhasilannya melalui capaian beberapa Indikator pada tabel berikut :

Tabel 5.2. Indikator sasaran strategis peningkatan akses layanan

KODE	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2019
IKSS 1.1	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja sebanyak 400.000 orang pada tahun 2019;
IKSS 1.2	Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan berwirausaha sebanyak 200.000 orang pada tahun 2019;
IKSS 1.3	Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri sebanyak 141.000 orang pada tahun 2019.

2. Meningkatnya standar program penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam meningkatkan layanan program kursus dan pelatihan kepada masyarakat; akan diukur keberhasilannya melalui capaian beberapa Indikator pada tabel berikut :

Tabel 5.3. Indikator sasaran strategis peningkatan standar program

KODE	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2019
IKSS 2.1	Jumlah program kursus (keterampilan) yang telah disusun standarnya sebanyak 169 jenis keterampilan pada tahun 2019;
IKSS 2.2	Jumlah jenis keterampilan yang terstandarisasi nasional kompetensi kerjanya sebanyak 20 jenis keterampilan;

3. Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang bermutu akan diukur dengan beberapa indikator keberhasilan seperti pada tabel 5.4.

Tabel 5.4. Indikator sasaran strategis peningkatan jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang bermutu

KODE	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2019
IKSS 3.1	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 75 kab/kota pada tahun 2019;
IKSS 3.2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan sebanyak 3.600 lembaga pada tahun 2019;
IKSS 3.3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang siap diakreditasi lembaganya sekurang-kurangnya sebanyak 13.000 lembaga pada tahun 2019;
IKSS 3.4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang tervalidasi sekurang-kurangnya sebanyak 20.989 lembaga pada tahun 2019;
IKSS 3.5	Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 4.088 lembaga pada tahun 2019;

4. Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan yang kompeten dan menerima penghargaan bidang kompetensi di tingkat internasional akan dicapai dengan mengacu pada beberapa indikator seperti pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Indikator sasaran strategis peningkatan jumlah lulusan kursus yang kompeten dan menerima penghargaan tingkat internasional

KODE	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2019
IKSS 4.1	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk sebanyak 1.575 lembaga pada tahun 2019;
IKSS 4.2	Jumlah master penguji dan penguji kompetensi kursus dan pelatihan sebanyak 1.107 pada tahun 2019;
IKSS 4.3	Jumlah peserta kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 528.000 orang pada tahun 2019;

#### D. Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi untuk dapat terpenuhinya sasaran strategi dan tercapainya agar target-target indikator yang telah dirumuskan di atas, maka diperlukan adanya rumusan arah kebijakan dan strategi pembinaan kursus dan pelatihan. Adapun rumusan arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan pada periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 5.6. Rumusan arah kebijakan dan strategi pembinaan kursus dan pelatihan periode 2015-2019

NO.	Arah Kebijakan	Strategi
01.	Meningkatkan akses terhadap layanan kursus dan bidang keterampilan	<p>Penyediaan layanan program PKM dan PKH bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, DO sekolah dan Lulus sekolah tidak melanjutkan, dan Pengangguran</p> <p>Penyediaan program pemagangan bagi peserta didik kursus dan pelatihan pada dunia usaha dan industri</p> <p>Penyediaan bantuan biaya uji kompetensi bagi peserta didik yang kurang mampu</p>
02.	Meningkatkan kualitas program kursus dan pelatihan keterampilan	<p>Penyediaan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berbasis Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>Penyediaan dan penerapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berbasis Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>Penyediaan dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)</p>
03.	Meningkatkan produktifitas masyarakat dengan memperkuat kemitraan dan penyalarsan dengan dunia usaha/industri	Penyediaan bantuan operasional bagi organisasi mitra/asosiasi profesi dan kapasitas anggotanya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program kursus dan pelatihan dan imbal swadaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu

NO.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>Peningkatan partisipasi dunia usaha/industri bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan untuk menyelenggarakan permagangan bagi peserta didik</p> <p>Pembangunan/revitalisasi LKP sebagai rujukan di setiap kabupaten/kota dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas kursus dan pelatihan yang diberikan</p> <p>Penerapan manajemen pengelolaan dan produktifitas lembaga melalui Penilaian Kinerja.</p> <p>Penyiapan lembaga kursus dan pelatihan melalui peningkatan kapasitas LKP menuju akreditasi untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu LKP sesuai kebutuhan stakeholder</p>
04.	Meningkatkan lulusan kursus dan pelatihan melalui uji kompetensi dan sertifikasi nasional maupun internasional	<p>Peningkatan jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Tempat Uji Kompetensi, dan Penguji/Master Penguji Uji Kompetensi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan</p> <p>Penyiapan peserta didik kursus dan pelatihan untuk mengikuti kompetisi dan sertifikasi tingkat internasional</p>



**BAB V**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN**  
**TAHUN 2015 – 2019**

**A. Sasaran Program**

Untuk mewujudkan program pembinaan kursus dan pelatihan yang merata, bermutu, dan kompeten serta berdaya saing, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah menetapkan sejumlah sasaran beserta indikator dan target capaiannya untuk periode setiap tahunnya dari tahun 2015 - 2016. Adapun sasaran program pembinaan kursus dan pelatihan adalah :

- 1) diperolehnya layanan pendidikan kecakapan hidup bagi remaja dan orang dewasa untuk dapat bekerja dan berwirausaha;
- 2) tersedianya fasilitas kursus dan pelatihan, kompetensi penyelenggara/pendidik kursus dan pelatihan dan kebijakan penyelenggaraan kursus dan pelatihan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan atau berwirausaha yang berstandar baik nasional maupun internasional dan berwawasan gender
- 3) tersedianya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education Sustainable Development/ESD*)
- 4) terbentuknya kewarganegaraan yang bersifat global

**B. Program dan Kegiatan**

Selanjutnya dari program dan kegiatan yang telah didefinisikan di atas, dapat ditetapkan sejumlah output dan komponen program pembinaan kursus dan pelatihan yang lebih bersifat operasional. Output dan komponen dari semua program dan kegiatan diatas dapat diidentifikasi seperti pada tabel 5.7. berikut:

Tabel 5.7. Output dan Komponen Program dan Kegiatan Ditbinsus periode 2015-2016

OUTPUT		KOMPONEN
1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	Pendidikan kecakapan hidup/kerja bagi Angkatan kerja muda
2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwawancara	Pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwawancara bagi angkatan kerja muda
3	Jumlah Kabupaten dan Kota yang memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Pembangunan Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota
4	Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan	Pengembangan Standar Program Kursus dan Pelatihan
5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	Penguatan lembaga kursus dan pelatihan/mitra
6	Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
7	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	Penyelenggaraan Uji kompetensi Peserta didik Kursus dan Pelatihan
9	Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	Bimbingan Teknis Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan
10	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang divalidasi	Validasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
11	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap diakreditasi	Penyiapan Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk diakreditasi
12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	Uji Kompetensi bagi master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan

OUTPUT		KOMPONEN
13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	Penyelenggaraan Magang bagi Peserta didik kursus dan pelatihan pada dunia usaha dan industri (DUDI)

Deskripsi dari beberapa program yang telah dirumuskan di atas dapat diuraikan lebih lanjut termasuk uraian tentang indikator kinerja dan output kegiatan yang diharapkan sebagai berikut :

#### 1. Program Kursus dan Pelatihan yang Bermutu bagi Penganggur Usia Produktif

Ada beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan layanan program kursus dan pelatihan berupa bantuan program, diantaranya tingginya jumlah penganggur, penduduk miskin, dan tidak bersekolah lagi berusia produktif. Keadaan ini akan memberikan beban tersendiri bagi pemerintah, dimana penduduk dengan permasalahan ini rentan terhadap munculnya permasalahan sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perdagangan orang (*trafficking*), maraknya demo yang anarkis, dan lemahnya daya saing bangsa.

Tujuan penyelenggaraan program ini antara lain; 1) memberikan berbagai keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja, dan 2) mendorong lembaga pendidikan nonformal, khususnya kursus dan pelatihan untuk memberikan pembekalan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penyelenggaraan layanan program kursus dan pelatihan meliputi:

##### a. Program Indonesia Terampil melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) atau *life skills education*.

Pendidikan kecakapan hidup (PKH) diartikan sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Program pendidikan kecakapan hidup di kursus dan pelatihan dimaknai sebagai program keterampilan hidup yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga kursus dan pelatihan untuk memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang karena sesuatu hal tidak memiliki keterampilan kerja agar mengikuti berbagai keterampilan sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja yang memadai untuk bekerja dan atau berusaha mandiri.

#### **b. Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)**

Program pendidikan kewirausahaan masyarakat adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peluang usaha yang ada di masyarakat.

Strategi untuk memberikan layanan program kursus dan pelatihan ini dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan seleksi calon peserta didik yang memenuhi kriteria;
- 2) Melakukan seleksi calon penyelenggara program dengan memprioritaskan lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dan/atau berkinerja A/B, serta satuan pendidikan nonformal lainnya yang memenuhi persyaratan;
- 3) Menerapkan pendekatan 4 in 1 dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menganalisa peluang usaha/kerja, melaksanakan pembelajaran di lembaga maupun magang di industri, melakukan evaluasi pembelajaran melalui uji kompetensi, dan menyalurkan lulusan untuk bekerja atau membantu peserta didik merintis usaha;
- 4) Memberikan bantuan dana penyelenggaraan program melalui lembaga penyelenggara.

Program dan kegiatan yang terkait dengan layanan program kursus dan pelatihan ini antara lain meliputi:

- 1) Penyusunan dan distribusi petunjuk teknis penyelenggaraan program;
- 2) Sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan program;
- 3) Seleksi calon penyelenggara program;

- 4) Pembekalan calon penyelenggara program;
- 5) Bantuan pelaksanaan program melalui lembaga penyelenggara program;
- 6) Monitoring dan evaluasi.

## **2. Standarisasi Program Kursus dan Pelatihan**

Standarisasi program kursus dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para penyelenggara kursus dan pelatihan agar memiliki mutu dan relevansi penyelenggaraan program sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Program dan kegiatan yang terkait dengan standari program kursus dan pelatihan meliputi:

- a. Penyusunan dan konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- b. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK);
- d. Penyusunan standar sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan bahan ajar cetak maupun elektronik;

Strategi penyusunan standar-standar ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Melibatkan unsur praktisi, pendidik kursus, penyelenggara kursus, akademisi, dunia usaha/industri, dan ahli di bidangnya;
- b. Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Diprioritaskan pada jenis-jenis keterampilan yang paling banyak diminati di masyarakat;

## **3. Standarisasi Lembaga Kursus dan Pelatihan**

Standarisasi lembaga kursus dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para penyelenggara kursus dan pelatihan agar memiliki standar dan mutu kelembagaan yang berdaya saing nasional atau internasional. Program dan kegiatan yang terkait dengan standarisasi kelembagaan kursus dan pelatihan meliputi:

- a. Penerbitan Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) bagi seluruh lembaga kursus dan pelatihan yang telah memiliki izin dari Dinas Pendidikan

kabupaten/kota atau badan/dinas pelayanan perizinan terpadu di tingkat kabupaten/kota;

- b. Penyusunan standar dan prosedur perizinan kerjasama penyelenggaraan kursus dan pelatihan dengan lembaga asing;
- c. Penyusunan standar kelembagaan kursus dan pelatihan;
- d. Penyusunan klasifikasi lembaga kursus dan pelatihan;
- e. Penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan;
- f. Penguatan lembaga dalam rangka persiapan akreditasi kursus dan pelatihan;

#### **4. Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 61 ayat 3 mengamanatkan bahwa "sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 89 ayat 5 disebutkan bahwa "sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi." Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.

Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan, dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi pada bidang yang dipajarnya.

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis tingkat pendidikan tertentu.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan uji kompetensi diantaranya peserta didik memperoleh pengakuan dan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk dapat dijadikan bekal untuk memperoleh pekerjaan/membuka usaha mandiri.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi meliputi:

- a. Pembentukan dan pemberian bantuan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK);
- b. Pembentukan dan pemberian bantuan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- c. Penyusunan soal uji kompetensi;
- d. Pemberian bantuan pelaksanaan uji kompetensi;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi;

## **5. Penguatan Kerjasama dengan Organisasi dan Lembaga Mitra**

Kerjasama kemitraan dengan organisasi mitra atau asosiasi profesi perlu terus dijalin dalam rangka pemerataan, perluasan, peningkatan mutu, dan daya saing penyelenggaraan kursus dan pelatihan.

Peningkatan mutu layanan kursus dan pelatihan merupakan suatu keniscayaan, terlebih dengan tantangan ke depan di era perdagangan bebas yang harus mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional untuk dapat bersaing di kawasan regional dan internasional. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Organisasi mitra kursus dan pelatihan adalah pihak-pihak yang dapat berperan strategis dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Peran itu antara lain memikirkan, menelaah, dan mengembangkan kurikulum, sarana pembelajaran, peningkatan mutu ketenagaan, pengujian dan sertifikasi peserta kursus seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap kursus dan pelatihan serta tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan dengan mengoptimalkan peran serta organisasi mitra.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi mitra dan asosiasi profesi diantaranya:

- a. Pemberian bantuan operasional (BOP-Ormit), yaitu pemberian bantuan dari pemerintah secara hibah kepada organisasi mitra kursus dan pelatihan sebagai stimulant untuk program penguatan manajerial dan kapasitas organisasi yang terkait dengan program-program pembinaan dan pengembangan kursus dan pealtihan;
- b. Kerjasama lintas sektor dalam rangka pelaksanaan program-program kursus dan pelatihan di berbagai daerah;
- c. Inovasi penyelenggaraan program dengan institusi dalam maupun luar negeri sebagai bentuk penguatan program-program penyelenggaraan kursus dan pelatihan di Indonesia;
- d. Kerjasama dengan organisasi/institusi mitra dalam rangka publikasi dan promosi kursus dan pelatihan di Indonesia.

Strategi yang dilakukan dalam rangka kerjasama dengan organisasi mitra/asosiasi profesi ini antara lain:

- a. Kerjasama saling menguntungkan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan organisasi mitra/asosiasi profesi;
- b. Mendorong tumbuhnya iklim penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang kondusif bagi keberlangsungan penyelenggaraan kursus dan pelatihan di Indonesia;
- c. Mendorong dan menumbuhkan minat masyarakat untuk mengikuti kursus dan pelatihan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan minat, bakatnya serta tuntutan dunia usaha/industri.

### **C. Indikator keberhasilan dan target capaian dalam periode 2015-2019**

Untuk mengukur keberhasilan dari semua program yang telah disusun baik secara parsial maupun agregat, maka perlu ditetapkan sejumlah target atas semua indikator yang telah ditentukan di atas. Adapun sasaran, indikator dan target yang ditetapkan untuk setiap program di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada periode tahun 2015 - 2019 dapat disajikan pada tabel 5.8.



Tabel 5.8. Sasaran, indikator dana target capaian program Ditbinsus periode 2015-2016

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha  Fasilitas Kursus dan Pelatihan, kompetensi penyelenggara/pendidik Kursus dan pelatihan, kebijakan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan, untuk penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan atau berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan global	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	40,000	90,000	90,000	90,000	90,000
	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	20,000	30,000	50,000	50,000	50,000
	Jumlah Kabupaten dan Kota yang memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	0	15	20	20	20
	Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan	18	36	37	40	38
	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	33	900	900	900	900
	Jumlah Jenis Kompetensi Kerja Terstandarisasi Nasional	3	5	5	5	5
	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	50	263	350	438	525
	Jumlah peserta didik memperoleh	51,773	108,000	140,000	140,000	140,000

bantuan uji kompetensi					
Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	0	1,022	1,022	1,022	1,022
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang divalidasi	2,000	5,093	5,194	5,298	5,404
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Siap di akreditasi	1,800	2,500	3,000	3,500	4,000
Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	100	175	250	325	357
Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	0	26,000	30,000	40,000	45,000

## BAB VI

### KERANGKA IMPLEMENTASI

#### A. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan

01. Peningkatan kualitas dan kapasitas pimpinan lembaga kursus dan pelatihan: 1) Pelatihan Pimpinan Kursus dan Pelatihan, dalam rangka meningkatkan layanan kursus dan pelatihan masuk desa, pengembangan pendidikan Vokasi, Kecakapan Hidup, Keprofesian dan Kewirausahaan; 2). Pelatihan Tenaga Pembina dan Pengembang Kursus dan Pelatihan dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia; 3). Pelatihan Pimpinan dan Pengurus Organisasi Mitra dalam rangka menumbuhkan komitmen kolektif untuk meningkatkan pelayanan kursus dan pelatihan dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan pengangguran, peningkatan standarisasi kursus dan pelatihan, peningkatan validasi kursus dan pelatihan, standarisasi kompetensi lulusan, dan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan;
02. Peningkatan fasilitasi untuk memperkuat kemampuan lembaga kursus dan pelatihan dalam rangka memperluas layanan dan percepatan pengentasan pengangguran dan kemiskinan: 1) Pengadaan Dana Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan; 2) Bantuan saran/prasarana untuk penyelenggaraan yang merata; 3) Pengadaan Buku Peduan Standar Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.
03. Pengembangan program kursus dalam rangka mendukung pewujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, regenerasi petani dan nelayan, dan daya saing pelaku ekonomi mikro dan kecil: 1) Mengembangkan jenis kursus dengan standar nasional antara lain; bidang kepariwisataan, bidang seni dan budaya, bidang pertanian, makanan dan minuman (tata boga), tata busana dan fesyen; 2) Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum yang terkait dengan jenis kursus tersebut; 3) Pengadaan bahan belajar; 4) Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program kursus dalam rangka regenerasi petani dan nelayan di desa pertanian dan desa pantai; 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan kecakapan hidup, vokasi, dan kewirausahaan di desa yang menjadi basis pengangguran dan masyarakat marginal.

04. Penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, instruktur, mentor dalam rangka meningkatkan akses pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin dan marginal; 1) Merekrut tenaga pendidik, instruktur, dan mentor dengan rasio 3 (tiga) orang untuk setiap desa miskin; 2) Pelatihan tenaga pendidik, instruktur, dan mentor dari setiap desa miskin yang akan diuntungkan pengangguran dan penduduk miskinnya melalui pendidikan kecakapan hidup, keterampilan fungsional, pendidikan vokasi, dan kewirausahaan; 3) Fasilitasi dana insentif pelatih, instruktur dan mentor yang melaksanakan tugas di desa miskin;
05. Penyediaan bahan belajar untuk peserta didik dalam rangka regenerasi petani, nelayan, pendidikan pendidikan vokasi dan kewirausahaan di pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; 1) Bahan Belajar Kerjakan Sendiri (*Do It Yourself Kit*); 2) Pengadaan buku keterampilan; 3) Pengadaan buku kewirausahaan; 4) Pengadaan Buku Panduan Memulai Usaha untuk *New Start-Up Entrepreneur*; 5) Pengadaan buku-buku motivasi kecakapan hidup untuk mengubah cara pandang masyarakat dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja; 6) Pengadaan bahan belajar yang terkait dengan pendidikan untuk semua (EFA).
06. Meningkatkan standarisasi jenis kursus baru yang sesuai dengan tren kebutuhan dunia usaha dan dunia industri memasuki era masyarakat ekonomi aseaan; 1). Pengadaan Panduan Standarisasi Kursus dan Pelatihan bidang keterampilan, vokasi, keprofesian, dan pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pengadaan Panduan Penyusunan bahan belajar bagi tenaga pendidik; 3) Melaksanakan sertifikasi tenaga pendidik; 4) Melaksanakan standarisasi LKS dan TUK.
07. Meningkatkan pelaksanaan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan: 1) Pengadaan Panduan Akreditasi; 2) Pelatihan Tenaga Pelaksana Akreditasi; 3) Penetapan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi untuk melaksanakan Kursus Masuk Desa:

## **B. Strategi Pendanaan**

Kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat, secara operasional telah dilaksanakan oleh lembaga secara mandiri. Namun demikian, dalam rangka standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendorong meningkatnya pemerataan, perluasan akses, dan

peningkatan mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan agar memiliki standar nasional serta mampu bersaing di tingkat regional.

Untuk mewujudkan program tersebut pemerintah pusat perlu melakukan dukungan program sebagai berikut:

INDIKATOR		Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan kecakapan hidup/kerja bagi Angkatan kerja muda	80,000	113,219	128,000	128,000	210,560
2	Pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwiasaha bagi angkatan kerja muda	50,000	52,500	175,000	175,000	175,000
3	Pembangunan Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	0	15,000	60,000	60,000	60,000
4	Pengembangan Standar Program Kursus dan Pelatihan	16,200	6,335	12,337	13,337	12,670
5	Penguatan lembaga kursus dan pelatihan/mitra	495	9,796	20,920	20,920	20,920
6	Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional	2,544	5,100	8,500	8,500	8,500
7	Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	750	1,650	11,550	14,438	17,325
8	Penyelenggaraan Uji kompetensi Peserta didik Kursus dan Pelatihan	29,511	8,660	8,660	8,660	8,660
9	Bimbingan Teknis Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan	0	-	-	-	-
10	Validasi Lembaga Kursus dan Pelatihan	2,000	4,200	10,908	11,126	11,349
11	Penyiapan Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk di akreditasi	3,600	6,300	10,500	12,250	14,000
12	Uji Kompetensi bagi master penguji dan penguji kursus dan pelatihan	1,000	700	1,750	2,275	2,499

INDIKATOR		Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Penyelenggaraan Magang bagi Peserta didik kursus dan pelatihan pada dunia usaha dan industri (DUDI)	0	5,000	150,000	200,000	225,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>186,100</b>	<b>228,461</b>	<b>598,126</b>	<b>654,506</b>	<b>766,484</b>

Selain dukungan dari pemerintah pusat, tanggung jawab pendanaan penyelenggaraan kursus juga perlu didukung oleh pemerintah daerah. Beberapa hal yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah antara lain; 1) Penataan perizinan, 2) Penguatan sarana dan prasarana pendidikan, 3) kerjasama kemitraan dengan dunia usaha/industri, dan 4) Penguatan daya saing lembaga di tingkat daerah.

### C. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kegiatan koordinasi pelaksanaan program dilaksanakan secara nasional dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan penyusunan rencana program yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Bappenas, Biro Perencanaan, dan unit pelaksana teknis. Implementasi dari rencana strategis ini selain perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait, juga perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan IKK yang akan dicapai dalam pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan.

Pengendalian terhadap implementasi renstra ini dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab kementerian dengan berkoordinasi dengan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

### D. Sistem Pemantauan, Validasi, dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsus) periode 2015-2019 ini merupakan bagian strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diharapkan dapat menjadi acuan berpikir operasional Ditbinsus. Berbagai referensi dan analisis yang relevan telah dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis internal dan eksternal karena adanya perubahan internal maupun eksternal yang penting untuk diakomodasikan. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi acuan bagi pimpinan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder dari Ditbinsus.

Rencana strategis yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun ini, memberikan arahan yang jelas atas harapan dan cita-cita Ditbinsus kedepan. Namun demikian, keberhasilan dalam meraih harapan dan cita-cita tersebut tidak bisa terwujud tanpa komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Pencapaian akan optimal, jika dilakukan koordinasi yang efektif di semua level manajemen di Ditbinsus dan kemampuan dalam memberdayakan semua potensi yang dimiliki baik dari sisi asset sumber daya manusia maupun asset lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan berdasarkan analisis kondisi saat ini dan yang akan datang. Menyadari bahwa perubahan lingkungan tetap bisa terjadi sehingga dimungkinkan terjadi perubahan atas Rencana Strategis yang telah disusun, maka diperlukan evaluasi dan monitoring secara periodik agar relevansi tetap terjaga.

Komunikasi dan koordinasi yang efektif semua level baik secara horisontal maupun vertikal sangat diperlukan agar pemahaman yang sama atas substansi Rencana Strategis ini dapat terjadi. Hal ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi Rencana Strategi ke dalam program kerja di setiap level yang selaras dan efektif. Selanjutnya mengingat pentingnya dokumen Rencana Strategis ini, maka sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk jika terjadi perubahan dalam perjalanannya.